**KATA PENGANTAR**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renstra merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun sedangkan Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

Dengan penyusunan Renstra ini diharapkan rencana strategis selama lima tahun kedepan yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah terarah dan terprogram, sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dicapai benar-benar telah direncanakan dengan baik dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan kedudukan, peran serta fungsi dari Renstra sebagai dokumen perencanaan dalam menentukan arah pembangunan dalam kurun waktu lima tahun, maka dalam penyusunannya kami betul-betul memperhatikan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Sale serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang

Dalam penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 ini kami yakin masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan periode berikutnya.

 CAMAT SALE

Drs. SUBHAN

 Pembina Tk.I

 NIP. 196611241992011005

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR . i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematik Penulisan Renstra 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Sale 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 6

2.2 Sumber Daya OPD 11

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sale 13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

 Kecamatan Sale 21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 23

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sale 23

3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

 Daerah Terpilih 26

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 30

3.4 Telaahan Rentstra K/L 33

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 39

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 41

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 43

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59

BAB VIII PENUTUP 60

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Sale Tahun

 2018 11

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai / Karyawan Lingkup Kecamatan Sale

 tahun 2018 11

Tabel 2.3 Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan

 Sale 12

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Indikator Program Kecamatan

Sale 15

Tabel 2.5 Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sale

 berdasarkan indicator,sasaran renstra Tahun 2016-2018….16

Tabel 2.6 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sale………..17

Tabel 2.7 Penyerapan Anggaran Kecamatan Sale Tahun 2016-2018…….19

Tabel 2.8 Pelayanan Non Perijinan……………………………………………….20

Tabel 2.9 Pelayanan Perijinan Ijin Usaha Mikro (IUM) Tahun

 2018 21

Tabel 2.10 Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sale……..21

Tabel 3.1 Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal

yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan di Kecamatan

Rembang 25

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Kecamatan Sale yang Mempengaruhi Pencapaian Visi

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 32

Table 3.3 Penentuan Isu Strategis……………………………………………36

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Kecamatan Sale Tahun 2016-2021 40

Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

 Kebijakan Kecamatan Sale Rembang Tahun 2016-

 2021 42

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

 dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sale……………………………44

Tabel 6.2 Target Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat

 Daerah Kecamatan Sale Tahun 2020 – 2021………………………….57

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada

 Tujuan Dan Sasaran RPJMD 59

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Perda No 5 Tahun 2016 10

**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

* 1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Sale ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih. Penyusunan Renstra Kecamatan Sale selain berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS dan Renstra Kecamatan Sale Provinsi Jawa Tengah .

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Melalui Perda No. 6 Tahun 2019, dalam rangka penyesuaian tersebut ditetapkan perubahan atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Dalam rangka menindaklanjuti Perda No. 6 Tahun 2019 tersebut, maka disusun Rencana Strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

Alasan yang paling mendasar atas perlunya dilakukan perubahan Renstra Kabupaten Rembang pada Tahun 2019 adalah untuk memberikan dasar/pedoman bagi dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sale, dimana Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016-2021 dilakukan perubahan.

Dengan gambaran pemikiran di atas, maka pada Tahun 2019 ini seluruh Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Sale, melakukan Perubahan atas Rencana Strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dengan kerangka logis mengarah pada hal utama yang menjadi prinsip perubahan, yaitu : Menjaga konsistensi dengan Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

Renstra Kecamatan Sale disusun dengan mengacu pada definisi yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 29 jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sale, yang disusun berpedoman pada RPJMD serta bersifat indikatif.

Proses penyusunan Perubahan atas Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
20. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang;
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

**1.3 Maksud Dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

**1.3.1 M a k s u d**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
2. Menjadi payung hukum terhadap renja kecamatan Sale Tahun 2020 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh kecamatan Sale Kabupaten Rembang selama kurun waktu Tahun 2016-2021
3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Camat Rembang yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2021.

**1.3.2 T u j u a n**

 Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan kecamatan Sale Kabupaten Rembang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

**1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan** Sale

 Sistematikan penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sale

**BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SALE** **KABUPATEN REMBANG**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB lV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

**BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH.**

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VlII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SALE**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

 Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten / Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintaha daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoodinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;

5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan kecamatan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan,

1. Kepala Seski Tata Pemerintahan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6.  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa..

1. Kepala Seki Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahtraan rakyat, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, social, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang kesejahtraan rakyat.

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum..

1. Kelurahan

Tugas Pokok: membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat ,pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretariat kelurahan

Tugas pokok: Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan,meliputi pembinaan Penatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian,pelayanan administrasi dilingkungan kelurahan.

11. Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum

 Tugas pokok: Melakukan penyiapan dan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan,evaluasi seta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketertiban ,keamanan dan pemerintahan umum,kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat , administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemilu, kelembagaan masyarakat, pertanahan dan perijinan IMB, HO, Kawasan perumahan, keramaian, SKCK, ijin tebang dan pengangkutan kayu.

12. Seksi Ekonomi,pembangunan dan kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, perijinan nikah, talak, cerai, rujuk dan pembinaan kehidupan keagamaan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

 Tugas pokok: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#

#

# **Gambar 2.1.Bagan Susunan Organisasi Perda No 5 Tahun 2016**

CAMAT

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Staf pelaksana

Staf pelaksana

Staf pelaksana

Staf pelaksana

* 1. **Sumber Daya Kecamatan Sale**
1. **Sumberdaya Aparatur**

Sumber Daya Manusia Kecamatan Sale terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (PNS), Sekdes (PNS), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2

**Tabel 2.1**

**Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Sale Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Pendidikan** | **Jenis Kelamin** | **Eselon** | **Pangkat / Golongan** | **Ket.** |
| **S2** | **S1** | **D3** | **SLTA** | **SLTP** | **Lk** | **Pr** | **IIIa** | **IIIb** | **Iva** | **IVb** | **IV** | **III** | **II** |  |
| 1 | Camat |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Sekcam |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | K a s i  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  |  |
| 4 | Kasubag  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 5 | Sttaf  |  | 2 |  | 6 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  |
| **Jumlah** |  | **6** |  | **10** | **2** | **17** | **1** | **1** | **1** | **4** | **2** | **2** | **8** | **8** |  |

**Tabel 2.2
Jumlah Pegawai / Karyawan Lingkup Kecamatan Sale tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Unit Kerja** | **Jenis Kelamin** | **Pendidikan** | **PNS Golongan / Ruang** | **THL** | **Ket** |
| **Lk** | **Pr** | **S2** | **S1** | **D3** | **SLTA** | **SLTP** | **IV** | **III** | **II** | **I** |
| 1 | Kecamatan Sale | 8 | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 2 | 8 |  |  | 4 |  |
| 2 | Sekdes PNS | 9 |  |  | 1 |  | 5 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **17** | **1** |  | **6** |  | **10** | **2** | **2** | **8** | **8** |  | **4** |  |

1. **Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana**

Sedangkan semberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Sale memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.3 meliputi :

**Tabel 2.3
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Sale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang/Jenis Barang** | **Jumlah Barang** | **Ket.** |
| 1 | Bangku Tunggu | 2 buah | Kurang baik |
| 2 | Kursi Rapat | 40 buah | Kurang Baik |
| 3 | Kursi Pejabat Eselon III | 2 buah | Kurang Baik |
| 4 | Kursi tamu Ukir | 1 set | Baik |
| 5 | Kursi Tamu Litna | 1 set | Baik |
| 6 | Almari Arsip | 4 buah | Baik |
| 7 | Kursi Rapat besi | 50 buah | Rusak berat |
| 8 | Meja Podium | 1 buah | Baik |
| 9 | Kursi Rapat plastik | 99 buah | Rusak berat |
| 10 | Meja Rapat panjang | 4 buah | Baik |
| 11 | Komputer | 2 buah | Baik |
| 12 | Sound System | 1 Unit | Baik |
| 13 | Kursi besi pejabat | 8 buah | Baik |
| 14 | Meja kerja pejabat | 3 buah | Baik |
| 15 | Lap Top | 6 buah | Baik |
| 16 | Televisi | 2 buah | Baik |
| 17 | Printer | 4 buah | Baik |
| 18 | Kamera Elektronik | 1 buah | Baik |
| 19 | Mesin Pinjer Print | 1 unit | Baik |
| 20 | Pesawat telefon | 1 unit | Baik |
| 21 | Mobil Dinas Avanza | 1 buah | Kurang baik |
| 22 | Motor Dinas  | 15 buah | 12 Baik/ 3 rusak |
| 23 | Genzet Honda 3000 | 2 buah | Baik |
| 24 | Proyektor + Attachmen | 2 Unit | 1 Baik/ 1 rusak |
| 25 | Bangku tunggu metal | 4 set | Baik |
| 26 | AC Sprit | 5 buah | Baik |
| 27 | Radio GORA | I Unit | Baik |
| 28 | Mesin pancacah kertas | 1 buah | Baik |
| 29 | Gedung Kantor | 1 lokal | Baik |
| 30 | Pendopo Kecamatan | 1 lokal | Baik |
| 31 | Gedung PATEN | 1 lokal | Baik |
| 32 | Ruang Garasi | 1 lokal | Baik |
| 33 | Kamar mandi | 1 lokal | Baik |
| 34 | Tempat Ibadah | 1 lokal | Baik |
| 35 | Meja Rapat panjang /meja ukir | 2 buah / 1 buah | Baik |
| 36 | Handpone | 1 Unit | Baik |

**2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sale**

Dalam upaya peningkatakan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui Peraturan Bupati tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada Camat untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kewenangan telah diserahkan beberapa kewenangan Bupati tersebut meliputi pelayanan penerbitan perijinan dan pelayanan penerbitan rekomendasi. Untuk bidang perijinan dikhususkan pada penerbitan usaha mikro yang tidak memerlukan rekomendasi meliputi : warung makan, warung kopi, warung kelontong, bengkel sepeda, sepeda motor, jasa bengkel las, jasa rias, jasa pangkas rambut dll. Sedangkan penerbitan usaha mikro yang memerlukan rekomendasi terdiri atas usaha : depot isi ulang, industri makan dan minuman produk rumah tangga, dan usaha lain dengan klasifikasi skala mikro. Untuk jenis penerbitan rekomendasi meliputi : Rekomendasi IMB, Ijin HO untuk skala kecil atau menengah, ijin keramaian, pengantar SKCK,surat keterangan tidak mampu dll.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melaui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good gavernance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepatdan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melaui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarka Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merealisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Sale.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Sale menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat , dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan

**a. Capaian Kinerja**

**1. Pencapaian Indikator Kinerja Program**

Pencapaian indicator kinerja program Kecamatan Sale tahun 2016-2018 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Sale**

| NO | Program | Indikator Kinerja | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|  | Program Manajemen Administrasi 1.Pelayanan Umum,Kpegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah. | %.Ketercapaian Pelayanan Umum | Bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | % Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % Ketercapaian Pelayanan Kepegawaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % Pemenuhan Pelayanan Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | % Keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah | Bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Program Peningktan Keterbukaab Informasi Publik | % Informasi yang disampaikan ke publik | Bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan,Pembangunan,Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman masyarakat. | % Pelaksanaan pembangunan secara swa kelola | Bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | % Penetapan APBDes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | %Lembaga kesejahteraan Masyaraka Desa/kelurahan yang aktif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % Penyelesaian permasalahan K3 (Ketertiban,Ketentraman,dan Meindahan ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sale**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Rembang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sale menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Rembang tahun 2016. Sebagaimana terlihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**

**Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang berdasarkan indicator,sasaran renstra Tahun 2016-2018**

| **No** | **Aspek bidang/urusan/indikator** | **Satuan** | **Target Renstra Tahun** | **Capaian Tahun** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019****Tw II** |
|  | **Penunjang Administrasi Pemerintahan** |  |  |
| 1 | IKM Kecamatan Sale | Nilai | na | na | 86,36 | na | na | na | 86,36 | na |
| 2 | % Desa maju dan mandiri | % | 0 | 0 | 0 | 4% | 0 | 0 | 0 | 333,25 |
| 3 | % Persentase Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.25 jt | % | 0 | 6 | P7 | 4% | 0 | 6 | 7 | 2,166 |
| 4 | % Persentase Kelurahan yang lunas bayar PBB | % |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Sumber : Kecamatan Sale*

**Tabel 2.6**

**Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Sale**

| NO | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya kebutuhan benda benda post | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0,20% | 100% | 100% |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,59% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis kantor | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan Perundang undangan | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Penyediaaan Makanan dan Minuman  | Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Penyediaan jasa Administrasi Kantor kantor/kebersihan | Tersedianya jasa administrasi kantor / kebersihan | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Pengadaan Mebelair | Tersedianya mebelair | paket | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Pengadaan Alat kantor dan rumah tangga | Tersedianya Komputer/lap top | unit | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 |  | - | - | 100% | 100% |
| 14 | Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor | Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | unit | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer | Terawatnya alat-alat kantor dan rumahtangga | Unit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman | Terpeliharanya Taman | unit | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | 100% |
| 18 | Penataan Lingkungan kantor | Terwujudnya lingkungan kantor yang indah | Paket | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | 100% |
| 19 | Pengadaan pakaian batik  | Terlaksananya pengadaan pakaian batik Tradisional | potong | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 100% | 100% |
| 20 | Fasilitasi PATEN | Terfasilitasinya PATEN | tahun | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 100% |
| 21 | Penyelenggaraan Musrenbang  | Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan | kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemdes | Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemdes | Desa | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 100% | - |
| 23 | Verifikasi APBDes | Terverifikasi APBDes | Desa | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 100% | -100% |
| 24 | Fasilitasi PKK | Terfasilitasinya PKK | Tahun | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. **Penyerapan Anggaran Kecamatan Sale**

**Tabel 2.7**

**Penyerapan Anggaran Kecamatan Sale**

**Tahun 2016-2018**

| NO | Program | Anggaran Tahun  | Realisasi Tahun  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (9) | (10) | (11) |
| **1** | **Pelayanan Adminstrasi Perkantoran** | 296.120.000,- | 223.760.000,- | 239.410.000,- | 296.120.000,- | 223.760.000,- | 239.410.000,- |
| **2** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 290.900.000,- | 241.690.000,- | 218.250.000,- | 290.900.000,- | 241.690.000,- | 218.250.000,- |
| **3** | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | - | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12.220.000 | 10.000.000,- | 8.460.000,- | 12.220.000 | 10.000.000,- | 8.460.000,- |
| 5 | Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa | - | - | 2.820.000,- | - | - | 2.820.000,- |
| 6 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum | 22.850.000,- | 25.000.000.- | 25.000.000,- | 22.850.000,- | 25.000.000.- | 25.000.000,- |
| 7 | Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa | 141.085.000,- | 160.000.000,- | 145.840.000,- | 141.085.000,- | 160.000.000,- | 145.840.000,- |
| 8 | Peningkatan Pelayanan Kegidupan Beragama | 3.750.000,- | 15.000.000,- | 22.000.000,- | 3.750.000,- | 15.000.000,- | 22.000.000,- |
| 9 | Pembinaan dan Peningkatan Sarana prasarana pemuda,Olah raga dan seni budaya | 30.000.000 | 43.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 | 43.000.000 | 28.000.000 |
| 10 | Peningkatan Jaminan Kesejahteraan social kemasyarakatan  | 35.000.000 | 41.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 41.000.000 | 35.000.000 |

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Sale terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.

1. Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

 Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.

1. Kelompok Non Perijinan
2. Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin HO, Ijin keramaian, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. ( Kartu keluarga )

Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu

di Kecamatan Sale dapat dilihat pada tabel 2.5 – 2.7 kurun waktu

2016 – 2018.

**Tabel 2.8
Pelayanan Non Perijinan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **JENIS PERIJINAN** | **TAHUN** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Pindah Penduduk | 303 | 279 | 241 |
| 2 | SKCK | 325 | 759 | 503 |
| 3 | Perijinan HO | 20 | 16 | 4 |
| 4 | Perijinan IMB | 8 | 6 | 4 |
| 5 | Perijinan Keramaian | 70 | 55 | 48 |
| 6 | Legalisasi Surat Keterangan | 1.648 | 741 | 864 |
| 7 | Legalisasi Nikah | 322 | 240 | 299 |
| 8 | KK | 3.491 | 1.803 | 1.952 |
| **TOTAL** | **5.032** | **3.899** | **3.915** |

**Tabel 2.9
Pelayanan Perijinan Ijin Usaha Mikro (IUM)Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS IUM** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | JASA | 6 | - | - |
| 2 | PERDAGANGAN | 5 | - | - |
| 3 | TOKO KLONTONG | 7 | - | - |
| 4 | WARUNG MAKAN | 5 | - | - |
| 5 | HOME INDUSTRI | 1 | - | - |
| **JUMLAH** | **24** | **-** | **-** |

**Tabel 2.10
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PELAYANAN** | **TAHUN** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | AKTA JUAL BELI | 5 | - | - |
| 2 | AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA | - | - | - |
| 3 | AKTA HIBAH | 1 | - | - |
| 4 | AKTA WARIS | - | - | - |
| **TOTAL** | **6** | **-** | **-** |

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rembang.**

Berdasarkan evaluasi kenerja Kecamatan Sale serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakatguna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace)* dan pemerintahan yang *bersih (clean governance)*serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabulitas kinerja pemerintah Kecamatan Sale Tahun 2016, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Sale kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

1. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi di jajaran pemerintah di semua tingkatan;
4. Paradigma pembangunan negara dimulai dari pinggiran (desa);
5. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
7. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
8. Rendahnya parsisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
9. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan
10. Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan
11. Banyaknya tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah / Bupati yang didelegasikan kepada Camat;
12. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBN/APBD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial;
13. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

**BAB III**
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sale**

 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Penyusunan perencanaan Anggaran belum berbasis kebutuhan dan permasalahan
2. Kurangnya data yang mendukung perencanaan program dan kegiatan di kecamatan
3. Masih lemahnya koordinasi antara perencana dengan seksi dalam proses penyusunan perencanaan anggaran
4. Belum tersedianya ruang/tempat sarana kelengkapan penunjang pengelolaan arsip
5. Terbatasnya jumlah SDM Aparatur yang ada di kecamatan
6. Lemahnya pemahaman SDM aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan data, administrasi dan kerasipan
7. Kurangnya koordinasi OPD teknis dalam pelaksanan kegiatan di Desa.
8. Belum berjalannya sistem pelaporan berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke kabupaten/OPD terkait
9. Masih lemahnya koordinasi penyediaan data kependudukan dan Catatan Sipil yang disampaikan dari desa ke kecamatan
10. Kurangnya Sarana prasarana penunjang kerja operasional
11. Kurangnya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN yang memadai
12. Pendelegasian kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil belum sepenuhnya disertai dengan fasilitas alat cetak yang mempermudah proses penyelesainnya
13. Belum adanya mekanisme *reward* dan *punishment* yang jelas bagi aparatur pemerintah kecamatan/kelurahan dalam menjalankan tugas
14. Masih terjadinya/banyaknya konflik perselisihan tanah di masyarakat
15. Masih lemahnya koordinasi desa terhadap penyediaan data dan informasi monografi dan kependudukan
16. Belum adanya sitem penyediaan basis data kependudukan yang terintregasi antara desa dan kecamatan
17. Masih rendahnya netralitas panita penyelengara Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
18. Masih rawan terjadinya money politik dan terjadinya konflik antar kelompok
19. Masih banyaknya desa dengan kekosongan jabatan perangkat desa
20. Standart kompetensi pendidikan dan ketrampilan rekrutmen perangkat desa masih rendah
21. Masih rendahnya kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
22. Masih adanya sekretaris desa yang diisi dari PNS yang belum ditarik ke OPD
23. Masih rendahnya pengetahuan SDM lembaga-lembaga desa dalam memahami peraturan perundangan
24. Masih kurangnya pengelolaan data aparatur pemerintah desa
25. Masih rendahnya pendataan inventaris dan sarana prasarana serta aset-aset pemerintahan desa
26. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa dalam pengelolaan tertib administrasi desa
27. Masih lemahnya partisipasi lembaga desa dalam pembangunan
28. Masih belum terpenuhinya target pelunasan pembayaran PBB 100 % oleh wajib pajak
29. Masih kurangnya kesadaran Petugas Pemugut PBB desa/Rayon untuk menyampaikan PBB tepat waktu dan nilai
30. Masih banyaknya tunggakan wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya
31. Masih kurangnya fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi bantuan kesejahteraan perangkat serta penggunaan dana bantuan desa esuai ketentuan yang ada;
32. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum;
33. Masih adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu oleh panitia penyelenggara pemilu,Peserta Pemilu, Tim Sukses, Parpol, Pengawas Pemilu;
34. Belum optimalnya peran kecamatan dalam penyelenggaran evaluasi pengesahan APBDesa;
35. Penetapan Perdes APBDesa tidak tepat waktu;
36. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan aparatur yang menjadi tanggungjawabnya;
37. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan ketahanan pangan;
38. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan perekonomian;
39. Rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan pembangunan prasarana dan sarana fisik prasarana jalan dan pengairan, pemukiman, kebersihan dan lingkungan;
40. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa;
41. Belum tersedianya basis data terpadu berbasis TI di desa dengan kecamatan
42. Kurangnya koordinasi lintas sektor dengan kecamatan terhadap dinas instansi / perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan permberdayaan masyarakat , ekonomi dan pembangunan;
43. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan pemberdayaan, ekonomi dan pembangunan antara kecamatan dan PD dan pemangku kebijakan lain;
44. Rendahnya partisipasi desa/kelurahan dalam mengikuti kegiatan lomba desa
45. Rendahnya partisipasi kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
46. Rendahnya keterwakilan kelompok kelompok yang termarginalkan, anak dan perempuan dalam mengikuti musrenbang di tingkat dusun/ RW, Desa dan kecamatan;
47. Tidak sinkronnya informasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa dari pemerintah kabupaten dengan penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa;
48. Banyaknya usulan program dan kegiatan hasil musrenbang desa, musrenbang kecamatan yang tidak dapat terealisasi;
49. Aadanya perbedaan perlakuan usulan program kegiatan melalui musrenbang dibandingkan dengan usulan program kegiatan melalui DPRD (aspirasi / pokok pikiran dewan);
50. keterbatasan jumlah SDM kecamatan Sale dibandingkan dengan luas wilayah jangkauan atau banyaknya desa;
51. persepsi negatif dari aparatur desa terhadap pelaksanaan monev yang dilaksanakan oleh aparatur kecamatan;
52. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan sarana darurat penanganan dan penanggulangan bencana di desa;
53. belum terlaksananya kegiatan inventarisasi penyajian dan pengolahan data terkait dengan IMB, ITU, HO, Ijin Usaha, dan perijinan lainnya, belum bisa dilakukan karena data berada pada KPPT;
54. rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
55. keterbatasan jumlah SDM dalam penegakan peraturan perundangan;
56. belum optimalnya koordinasi antar aparatur penegak hukum di wilayah kecamatan;
57. keterbatasan jumlah SDM untuk melakukan penegakan peraturan dan penertiban;
58. keterbatasan SDM dalam melakukan pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan;
59. rendahnya frekuensi koordinasi dengan PD yang terkait dengan kesejahteraan rakyat;
60. Kurangnya koordinasi PD dalam melaksanaan pendataan di desa dalam penentuan indikator kemiskinan;
61. Kurangnya koordinasi dalam penentuan status sosial masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk program PKH, RASKIN, KKS, KIS, KIP, INDONESIA ONE;
62. Rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, kenakalan remaja, korban bencana alam, korban penyalahgunaan obat dan data kesejahteraan social;
63. Kurangya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat;
64. Belum optimalnya kegiatan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan;
65. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan keagamaan, pemuda dan olah raga, kesenian, peranan wanita, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan dan kebudayaan tingkat kecamatan karena kurangnya SDM dan sarana prasarana pendanaan.

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Sale**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AspekKajian  | Capaian/Kondisi Saatini  | Standar YangDigunakan  | Faktor Yang, Mempengaruhi | PermasalahanPelayanan  |
| Internal Kecamatan(KewenganKecamatan) | Eksternal(Di LuarKewenanganKecamatan) |
| StrukturOrganisasidanTata Kerja  | 1 org Camat1 org Sekcam4 org. Kasi2 Kasubbag.  | Perda.Kab.RembangNo. 5 Tahun2016 tentangOrganisasidan TataKerja PD | lemahnyakoordinasiantarpejabatstrukturalyang ada  | Terbatasnya PNS,maka kasi/kasubag kekurangan Staf.  | Terhambatnya Koordinasi antar pejabat sertaurusanProgram dan dan Keuangan  |
| Sarana danPrasarana | (jumlah) barangyang terincidalam tabel  | Rekap HasilSensus Tahun | lemahnyakoordinasiantarpem. kec.dengan bag.perlengkapandan aset | adanyapenambahansarana danprasaranayangbersumberdana dariluar kec. | Belum tersedianyadatasarana danPrasaranayang tersusunsecarasistematisdan akurat |
| SumberDayaManusia | terdapat19 orang PNS | Hasil AnalisisBeban Kerja  | kurangnyadiklat teknisyg dimiliki  | terbatasnyapenyelenggaraandiklat teknis danfungsional yangmenunjang pengembangan kualitassumber daya manusia | rendahnyapemahaman dan pengetahuan terhadappelaksanaantugas danfungsi sebagaiaparaturkecamatan  |

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

1. Visi Kepala Daerah

Visi dan Misi kepala daerah terpilih sebagai sebagai strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan pendanaan yang menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahun kedepan Visi kepala daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021 yaitu **“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun tersebut adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, yaitu masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut ditempuh melaui :

1. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan;
2. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Peningkatan Pelayanan publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan berdasarkan Visi Kabupaten Rembang dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA “

Makna sejahtera berdasarkan Visi dalam RPJPD tersebut adalah sejahtera dalam jasmani dan rokhani, yang diartikan bahwa seluruh masyarakat Rembang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, dan tingkat pendidikan yang memadai, yang ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita; tingginya angka partisipasi pendidikan ;menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya prosentasi keluarga dengan rumah layak huni;meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; eningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial;kondisi aman,tentran,tertib dan damai.

Sejahtera dalam kebutuhan rokhani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis yaitu masyarakat yang beriman, beraakhlak mulia, kerukunan antar umat beragama, serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

1. Misi

Misi kepala daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat di dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2016-2021:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup;
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pedidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat , termasuk pendidikan keagamaan;
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal;
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut kecamatan Sale sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitanya dengan pelayan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pelindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu untuk ***mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah,*** maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yaitu:

1. Terwujudnya *Good Governance*;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian visi;
3. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima.

Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu ***“Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.”,*** maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Membangun kemandirian ekonomi daerah;
2. Mengurangi angka pengangguran;
3. Menurunkan angka kemiskinan;
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi II yaitu:

1. Meningkatnya kinerja sektor pertanian,kehutanan dan perikanan;
2. Meningkatnya kinerja industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
3. Menurunnya angka pengangguran;
4. Menurunnya angka kemiskinan;
5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu **“*Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.”****,* maka tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III yaitu:

1. Meningkatnya nilai Investasi;
2. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif;
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu *“****Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan****”,* maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur;
2. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.;
3. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;
4. Berkurangnya luas kawasan kumuh;
5. Meningkatnya cakupan akses air bersih;
6. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak;
7. Meningkatnya persentase RTH;
8. Meningkatnya ketersediaan air baku;
9. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Tujuan dan sasaran misi V (lima) yaitu *“****Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”,*** maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat;
2. Membangun Sistem Pendidikan Yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan;
3. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi V yaitu:

1. Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya angka rata rata lama sekolah;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan;
5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Misi VI (enam) yaitu *“****Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.”,*** maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat;
2. Meningkatkankualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat;
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlidungan anak;
4. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan
5. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VI yaitu:

1. Menurunnya kasus ganguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS;
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak;
5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
6. Meningkatnya tertib adminsitrasi kependudukan ;
7. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya.

Tujuan dan sasaran Misi VII (tujuh) yaitu ***“Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.”,*** maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VII yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan, aksessibilitas, kelancaran distribusi dan keamanan pangan
2. Meningkatnya daya beli masyrakat;
3. Meningkatnya poduktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Sale mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, nelaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

* 1. **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah: untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

1. pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
2. pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
3. pengembangan potensi sektor pertambangan;
4. pengembangan potensi sektor industri
5. pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
6. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

1. Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
2. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
3. Mengembangkan kawasan agropolitan;
4. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
5. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
6. Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
7. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
8. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
9. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
10. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
11. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
12. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
13. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
14. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
15. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
16. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
17. Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
18. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
19. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
20. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
21. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
22. Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
23. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
24. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
25. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
26. Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
27. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
28. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
29. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
30. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
31. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
32. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
33. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
34. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
35. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
36. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
37. Terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
38. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

(a) Sistem pusat kegiatan dan

(b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Sale adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
4. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK ) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Sale Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sale, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RTRW)

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sale yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Faktor Pendorong** | **Faktor Penghambat** | **Ket.** |
| 1 | Eksistensi keberadaan Kecamatan Sale sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan Prasarana Inftastruktur pelayanan publik yang kurang memadai |  |
| 2 | Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha | Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan |  |
| 3 | Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan( PATEN ) | Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan |  |
| 4 | *Sustainable devolepment*  (pembangunan berkelanjutan) | Kurangnya pemahaman kepada masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan  |  |
| 5 | Pengembangan potensi pariwisata | Mendorong kemandirian daerah  |  |
| 6 | Ketahanan pangan dan energi | Perubahan alih fungsi lahan |  |
| 7 | Penetapan Kawasan Kota Tanpa Kumuh | Pemenuhan 100 % Sanitasi, 0 % Kawasan Kumuh, 100 % air bersih |  |

**3.4 Telaahan Renstra K/L**

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, danarah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan,serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri.Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 Arah Kebijakan dan Strategi, diantaranya adalah kebijakan ke-7 sebagai berikut:

**Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:**

a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;

b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;

c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

Penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi di atas adalah Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatanhambatan birokratis.

Adapun Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, diantaranya yang berhubungan dengan tupoksi kecamatan yaitu **Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,** dengan sasaran program **Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada**. Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tupoksi kecamatan yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK) Terpadu dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu. dengan indikator kegiatan yaitu Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Rembanb ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana Kantor belum terpenuhi secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi UPT yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

**3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik ;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Rendahnya partispasi masyarakat dalam pembangunan desa.

**Tabel 3.3.**

**Penentuan Isu Strategis**

| **No** | **Isu/Masalah** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** | **Program** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rumusan Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Rumusan Program** | **Indikantor** |
| 1 | Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pembayaran PBB tepat waktu | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu | Prosentase Pelunasan PBB | Meningkatkan kesadaran Masyarakat dengan Pembentukan Tim intensifikasi PBB baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Desa  | Mempermudah dan memperbanyak akses pembayaran pajak serta ketersediaan Tim intensifikasi PBB untuk menarik pembayaran pajak dari pintu ke pintu |  |  |
| 2 | Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik lengkap pelayanan PATEN | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Publik lengkap PATEN | Tingkat Kepuasan Masy./Skor IKM/SKM | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui melalui peningkatan SDM,PembuatanPencapaian SOP,SPP maklumat dan Monev Pelayanan Publik serta peningkatan sarana prasarana pelayanan publik | Peningkatan kualitas pelayanan publik secara bertahap dimulai kualitas SDM,Managemen pelayanan dan sarana prasaran |  |  |
| 3 | Banyaknya Pelanggaran Perda Oleh Masyarakat | Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang diterapkan | Menurunya Kasus Pelanggaran Perda | Tingkat pelanggaran Perda | Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemberlakuan Perda melalui Sosialisasi terhadap jenis-jenis Perda yang diberlakukan ditengah-tengah masyarakat  | Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Perda yang dititik beratkan pada Perda-perda lingkungan dan ijin keramaian |  |  |
| 4 | Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di Desa | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa | Presentse kehadiran masyarakat yang diundang pada Musrenbangcam | Meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam dan Desa melalui pemilihan peserta yang tepat. |  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa |  |  |
| 5 | Relatif rendahnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat | Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban | Menurunya kasus-kasus keamanan dan ketertiban | Jumlah Kasus keamanan dan ketertiban | Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui patroli rutin,dan pembinaan Peningkatan Kemampuan Hansip /Linmas di tingkat Desa | Peningkatan keamanan dan ketertiban yang difokuskan pada wilayah-wilayah rawan di masyarakat |  |  |
| 6 | Rendahnya Kwalitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Meningkatkan Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Meningkatnya kualitas pengelolaan Kelembagaan di tingkat Desa | Prosentase kelembagaan Desa yang mendapat pembinaan  | Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui fasilitasi,pelatihan,bintek,pendampingan dan pembinaan secara periodik | Peningkatan kapsitas lembaga Desa ditekankan pada kemampuan penyusunan,perencanaan dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan |  |  |
| 7 | Rendahnya kualitas Kegiatan-kegiatan Kesra | Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat  | Meningkatnya kwalitas pengelolaan kelembagaan Desa | Prosentase keterpaduan data antara Desa dan Dinas Instansi terkait | Sinkronisasi data dilakukan melalui koordinasi pada data kesra ditingkat Desa dan dengan Dinas Instansi terkait ditingkat Kabupaten | Peningkatan kwalitas kegiatan Kesra difokuskan pada ketepatan sasaran dan ferivikasi atas data terutama data Penduduk Miskin  |  |  |
| 8 | Kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas SDM | Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas SDM  | meningkatnya kualitas SDM  | Terpenuhinya kebutuhan Pegawai sesuai SOTK dan Peningkatan Ketrampilan SDM | Mengusulkan Kekurangan Pegawai kepada BKD dan Meningkatkan ketrampilan dengan mengikuti diklat. | Mencukupi kebutuhan Pegawai (Sementara) melalui Rekrutmen THL dan Pelaksanaan Bintek sesuai kebutuhan yang mendesak |  |  |
| 9 | Rendahnya Kualitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana Kantor sebagai penunjang Kinerja Aparatur dalam melaksanakan Tugas | Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Sarana Prasarana Kantor | Meningkatnya Kualitas dan Kwantitas Sarana Prasarana Kantor | Prosentase terpenuhinya kebutuhan Sarpras. | Melalui Kegiatan Pemeliharaan, Pengadaan dan Perbaikan Sarpras. | Pemenuhan Sarpras yng mempengaruhi pelayanan Publik |  |  |

**BAB IV**
**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **Tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Sale**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1. **Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, adalah :.

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sale
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sale.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sale seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Sale Kabupaten Rembang diharapkan menjadi koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Sale.

1. **Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sale dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sale selama tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Sale
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Kecamatan Sale

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sale
Tahun 2016-2021**

| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN / SASARAN** | **KINERJA TUJUAN / SASARAN**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALISASI** | **TARGET** |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  (8) | (9) | (10) |
| Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”   |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public kecamatan Sale |  | Nilai SAKIP Kecamatan Sale | na | na | Na | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Sale | na | na | 81,36 | 81,86 | 81,36 -82,25 | 82,26- 88 |
| 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Sale
 | Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sale | na | na | 45,48 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
| 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik
2. Kecamatan Rembang Kecamatan Rembang Kecamatan Rembang
 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Sale | na | na | na | 2 | 2,80 | 2,80 |

**BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management).*Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Rembanb dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
2. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
4. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
6. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa
7. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
8. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
9. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
10. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
11. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
12. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
13. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana  Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Rembanb ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sale.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Sale dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

**Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Sale Tahun 2016-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |  |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sale | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Sale | Optimalisasi kinerja organisasi | 1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
4. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan
 |
| Meningkatnya kualitas Pelayanan publik | Peningkatan sistem pelayanan publik | 1. Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik
2. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran
3. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur
4. Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
 |

**BAB VI**
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

1. Program Managemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan perangkat Daerah
2. Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Peningkatan Kwalitas Sumer daya Aparatur
5. Penigkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan keuangan
6. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
7. Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
8. Penyususnan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah
9. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
10. Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik
11. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan ketentraman masyarakat
12. Fasilitasi Penyekenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
13. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa
14. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
15. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

**Kecamatan Sale**

|  |  | Indikator | Program dan Kegiatan | IndikatorKinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanTahun 2015 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD |
|  |  | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|  |  | 1 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Benda-benda pos | 300.000 | 12 bl | 300.000 | 12 bl | 600.000 |  | 1.000.000 | 12 bln | 1.120.000 | 12 bln  | 1.200.000 | 750 srt | 1.200.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik | TerbayarnyaRekening telepon, Air dan listrik | 15.600.000 | 12 bl | 16.680.000 | 12 bl | 21.960.000 | 12 bl | 23.000.000 | 12 bl | 25.000.000 | 12 bln | 28.800.000 | 3 fslt | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Keuangam OPD | 45.650.000 | 12 bl | 71.755.000 | 12 bl | 67.850.000 | 12 bl | 95.000.000 | 12 bl | 75.650.000 | 12 bl | 76.6000.000 | 12 bl | 100.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | Terbayarnya honor tenaga kebersihan | 12.000.000 | 12 bln  | 13.600.000 | 12 bl | 15.050.000 | 12 bl | 12.650.000 | 12 bl | 15.050.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Alat Tulis kantor | Tersedianya ATK | 25.950.000 | 12 bl | 16.000.000 | 12 bl | 8.000.000 | 12 bl | 9.000.000 | 12 bl | 5.000.000 | 12 bl | 7.000.000 | 1 pkt | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa | Tersedianya jasa Foto Copy | 16.750.000 | 12 bl | 16.760.000 | 12 bl | 6.650.000 | 12 bl | 4.000.000 | 12 bl | 3.000.000 | 12 bl | 5.000.000 | 1 pkt | 7.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya peralatan listrik dan elektronik | 11.500.000 | 12 bl | 11.500.000 | 12 bl | 12.500.000 | 12 bl | 4.000.000 | 12 bl | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersediannya dekorasi/banner | 2.400.000 | 1 pkt | 4.000.000 | 1 pkt | 7.500.000 | 1 pkt | 4.000.000 | 1 pkt | 5.200,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Alat Pembersih Kantor | 10.000.000 | 12 | 11.500.000 | 12 | 3.000.000 |  | 1.000.000 | 12 bl | 2.000.000 | 12 bln | 2.500.000 | 1 kgt | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Langganan Surat Kabar | 4.200.000 | 12 bl | 4.200.000 | 12 bl | 1.980.000 | 12 bl | 1.000.000 | 12 bl | 1.980.000 | 12 bl | 1.980.000 | 1 pkt | 1.980.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 20.000.000 | 12 bl | 67.400.000 | 12 bl | 20.000.000 | 12 bl | 20.000.000 | 12 bl | 22.560.000 | 12 bl | 27.900.000 | 12 kl | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  | Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | Terlaksananya perjalanan dinas |  |  |  | 12 bl | 6.000.000 |  |  | 12 bl | 24.000.000 | 12 bl | 12.000.000 | 12 bl | 20.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Administrasi kantor/ kebersihan | Terbayarnya Tenaga Harian Lepas | 24.875.000 | 12 bl | 30.025.000 | 12 bl | 15.020.000 | 12 bl | 12.650.000 | 12 bl | 30.650.000 | 12 bl | 54.100.000 | 12 bl | 72.000.000 |  |  |
|  |  |  | Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya perjalanan dinas | 27.400.000 | 12 bl | 32.400.000 | 12 bl | 36.000.000 | 12 bl | 48.000.000 | 12 bl | 40.000.000 | 12 bl | 40.000.000 | 40 kl | 30.000.000 |  |  |
|  |  | 2 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasioanl | Tersediannya kendaraan dinas | 40.000.000 | 1 unt | 55.000.000 |  |  |  |  | 1 unt | 21.924.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Tersediannya perlengkapan gedung kantor | 20.600.000 |  |  | 1 pkt | 71.190.000 |  |  |  |  | 1 pkt | 20.000.000 | 100 bh | 65.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersediannya peralatan gedung kantor | 13.800.000 |  |  | 1 unt | 25.000.000 | 1 unit | 10.800.000 | 1 unt | 15.000.000 | 1 unt | 20.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Instalansi listrik, telepon dan air | Tersediannya instalansi listrik, air dan telepon  |  |  |  |  |  |  |  | 12 bl | 18.200.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Mebeleer | Terpenuhinya perlengkapan kantor | 12.400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan komputer | Terpenuhinya komputer | 24.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan leptop | Terpenuhinya leptop | 13.500.000 | 1 unt | 7.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Alat komunikasi | Terpenuhinya alat komunikasi |  | 1 unt | 7.500.000 | 1 unt | 6.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan alat kantor dan rumah tangga | Tersediannya alat rumah tangga | 4.500.000 | 1 pkt | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembangunan pagar | Terbangunnya pagar | 25.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembangunan gedung kantor | Terbangunnya gedung kantor |  |  |  |  |  | 1 pkt | 45.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas | 5.500.000 | 12 bl |  |  |  | 12 bl | 3.000.000 |  |  | 12 bl | 4.450.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 7.400.000 | 1 kgt | 12.000.000 | 1 kgt | 15.000.000 | 1 kgt | 13.000.000 | 1 kgt | 5.550.000 | 1 kgt | 6.540.000 | 1 kgt | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas | 27.300.000 | 1 kgt | 27.300.000 | 1 kgt | 10.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 | 1 kgt | 7.500.000 | 1 kgt | 14.000.000 | 1 kgt | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Terpelihranya mobil jabatan |  |  |  |  |  | 1 kgt | 3.000.000 | 1 kgt | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemelihataan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | Terawatnya perlengkapan gedung kantor |  | 12 bl | 3.000.000 | 12 bl | 3.000.000 | 12 bl | 10.000.000 | 12 bl | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemelihataan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | Terawanya gedung kantor |  | 12 bl | 3.500.000 | 12 bl | 4.500.000 |  |  | 12 bl | 3.000.000 |  |  | 12 bln | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/ berkala mabelair | Terawatnya mebelair |  | 1unit  | 2.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin berkala komputer | Terwujudnya rumah dinas baik | 8.600.000 | 1 unit | 8.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaaan rutin/berkala gedung pertemuan | Terwujudnya gedung kantor baik | 15.000.000 | 12bln | 20.000.000 | 12 bl | 7.500.000 | 12 bl | 4.000.000 |  |  | 12 bl | 7.200.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembangunan gudang/workshop/garasi | Terbangunnya garasi |  | 1 pkt | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan utin/berkala taman | Paving Halaman | 17.500.000 |  |  | 12 bl | 20.000.000 |  |  | 12 bl | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Tersedianya Printer | 60.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Terbangunnya garasi |  | 1 pkt | 75.000.000 | 1 pkt | 50.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin rumah ibadah | Terpeliharannya rumah ibadah | 2.500.000 | 12 bln | 19.000.000 |  |  |  |  |  |  | 12 bln | 9.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Rehabilitasi sedang/berat tempat ibadah | Terbangunnya tempat ibadah |  |  |  |  |  | 1 pkt | 45.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Printer | Tepenuhinya printer | 2.500.000 | I unt | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pentaan lingkungan kantor/ rumah jabatan/dinas | Terpeliharannya lingkungan kantor | 97.000.000 |  |  | 1 kgt | 25.000.000 |  |  | 1 kgt | 20.000.000 |  |  | 1 kgt | 150.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan peralatan dan mesin | Terpenuhinya peralatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 unt | 45.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penataan wajah Kota Kecamatan | Terbangunnya wajah kota kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 pkt | 200.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Program Peningkatan Disilpin Aparatur** | **Prosentase tingkat kedisiplinan SDM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Pakian Dinas berserta perlengkapannya | Tersedianya pakian dinas harian | 7.675.000- | 23 ptg | 13.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ptg | 11.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian dinas khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pakian olah raga | 9.825.000 | 23 ptg | 62.000.000 | 23 ptg | 5.000.000 |  |  | 22 ptg | 8.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penagadaan pakaian Batik tradisional | Terpenuhinya pakaian batik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 ptg | 10.750.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Operasional admin prinjer print | Terpenuhinya honorarium admin prinjer print |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 bl | 3.000.000 | 12 bl | 3.000.000 |  |  |
|  |  |  | Honor admin SIPANDU | Terpenuhinya honorarium admin sipandu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 bl | 2.600.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program peningkatan kapsitas sumber daya aparatur** | **Jumlah dokumen menejemen kepegawaian yang dikelola dengan baik** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pendidikan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia | Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 45.200.000 |  |  | 1 kgt | 50.000.000 |  |  |
|  |  | 3 | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Fungsi Pemerintah-an** | **Jumlah dokumen pelaporan keuanagn dalam kualitas baik** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Renstra, Renja | Tersusunnya renstra yang baik | 3.000.000 | 2 dok | 3.055.000 | 2 dok | 6.050.000 | 2 dok | 2.000.000 | 2 dok | 16.000.000 | 2 dok | 7.600.000 | 2 dok | 15.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyusunan laporan capaian renja Triwulan | Tersusunya laporan capaian renja triwulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 kgt | 2.500.000 | 4 kgt | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyusunan RKA/DPA | Tersusunnya RKA/DPA | 3.000.000 | 2 dok | 3.055.000 |  |  |  |  |  |  | 2 dok | 8.750.000 | 2 dok | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyusnan Laporan Tahunan | Tersusunnya laporan tahunan | 3.000.000 | 1 dok | 3.055.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan LAKIP | Tersusunnya LAKIP | 3.000.000 | 1 dok | 3.055.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan pelaporan keuangan SKPD | Tersusunnya laporan keuangan SKPD |  |  |  | 1 dok | 3.050.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan dokumen-dokumen anggaran | Tersusunnya dokumen anggaran |  |  |  | 1 dok | 6.050.000 | 1 dok | 2.000.000 | 1 dok | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penatausahaan barang milik daerah | Tersusunnya penatausahaan barang milik daerah |  |  |  | 1 dok | 6.050.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan LKJiP, LKPJ dan LPPD | Jumlah dokumen penatausahaan yang telah disusun |  |  |  |  |  | 2 dok | 2.000.000 | 2 dok | 3.050.000 | 2 dok | 2.500.000 | 2 dok | 15.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang telah disusun |  |  |  |  |  |  |  | 1 dok | 3.050.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan LKPD | Jumlah laporan penatausahaan keuangan yang disusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 dok | 3.250.000 | 1 dok | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Program peningkatan sarana prasarana pemerintah dan pelayanan umum**  | Persentase layanan PATEN yang terfasilitasi  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) | Meningkatkan kualitas pelayanan umum |  | 12 bln | 22.850.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 45.000.000 | 12 bln | 74.800.000 | 10 dok | 54.170.000 | 12 bln | 54.170.000 |  |  |
|  |  |  | Penunjang pemilihan kepala desa | Jumlah fasilitas pemilihan kepala desa |  |  | 9.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Jumlah usulan desa yang sesuai kewenangan |  | 1 kgt | 21.205.0000 | 1 kgt | 25.000.000 | 1 kgt | 19.000.000 | 1 kgt | 21.600.000 | 1 kgt | 37.095.000 | 1 kgt | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran Pemdes | Jumlha desa yang dibina |  | 1 kgt | 110.880.000 | 1 kgt | 111.000.000 | 1 kgt | 86.000.000 | 1 kgt | 96.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi MTQ/STQ | Jumlah peserta lomba MTQ |  | 1 kgt | 3.750.000 | 1 kgt | 8.000.000 | 1 kgt | 7.000.000 | 1 kgt | 8.000.000 | 1 kgt | 10.000.000 | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pelayanan ibadah haji | Jumlah fasilitasi dalam kegiatan ibadah haji |  |  |  | 1 kgt | 7.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 |  |  | 1 kgt | 6.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi kegiatan bulan Ramadhan | Jumlah fasilitasi kegiatan bulan Ramadhan |  |  |  |  |  | 1 kgt | 6.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi peringatan hari besar kewanitaan | Jumlah fasilitasi hari besar kenegaraan |  |  |  |  |  | 1 kgt | 4.000.000 | 1 kgt | 5.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Hari Besar Kenengaraan | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hari besar kenegaraan |  | 1 kgt | 30.000.000 | 1 kgt | 35.000.000 | 1 kgt | 47.000.000 | 1 kgt | 35.000.000 | 1 kgt | 29.940.000 | 1 kgt | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  | Perlindungan anak | Jumlah peserta dalam sosialisai mngenai perlindungan anak |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 10.000.000 | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan lomba hari Kartini | Jumlah fasilitas kegaitan lomba hari Kartini |  |  |  |  |  |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi kagiatan olahraga | Jumlahpeserta yang mengikuti kegiatan olahraga |  |  |  |  | 8.000.000 |  |  |  | 10.000.000 |  | 8.000.000 |  | 8.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi PKK | Jumlah PKK desa yang aktif |  | 1 kgt | 20.000.000 | 1 kgt | 41.000.000 | 1 kgt | 27.000.000 | 1 kgt | 30.000.000 | 1 kgt | 37.500.000 | 1 kgt | 37.500.000 |  |  |
|  |  |  | Pembinaan hansip/linmas | Jumlah wrga yabf mengikuti pembinaan hansip/linmas |  |  |  |  |  |  | 4.000.000 |  | 10.000.000 |  | 8.200.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Validasi desa miskin tk Kecamatan | Jumlah desa yang aktif update DTKS |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 5.000.000 | 1 kgt | 4.650.000 | 1 kgt | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitas pokjanal kecamatan sehat | Jumlah desa yang mengikuti kegaitan pokjanal |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 15.000.000 | 1 kgt | 72.750.000 | 1 kgt | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Raperdes dan APBDesa | Jumlah desa yang telah melaporkan Raperdes dan APBDesa |  |  |  |  |  | 1 kgt | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah peserta yang dilatih untuk menjadi kader dalam PMD |  | 1 kgt | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi pengisian perangkat daerah | Jumlah perangkat desa yang mengikuti bimbingan |  |  |  | 1 kgt | 17.800.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa | Jumlah desa yang aktif melaporkan anggaran pendapatan dan belanja aset |  |  |  |  |  | 1 kgt | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sosialisasi dan bimbingan administrasi desa | Jumlah desa yang telah menguikuti bimbingan mengenai administrasi desa |  |  |  |  |  | 1 kgt | 7.000.000 | 1 kgt | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verifikasi APBDesa | jumlah desa yang melaporkan mengenai APBDesa |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi penyusunan perde | Jumlah desa yang telah menyusun perde |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Jumlah desa yang tertib administrasi keuangan desa |  |  |  |  |  | 1 kgt | 6.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 | 1 kgt | 5.000.000 | 1 kgt | 15.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pemberdayaan organisasi kepemudaan di tk Kec | Jumlah organisasi pemuda yang aktif |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 15.000.000 | 1 kgt | 10.000.000 | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  | Penguatan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKMB) | Terlaksanakannya kegiatan PKMB |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penunjang DEKS PILKADES | Terlaksananya DEKS Pilkades |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 23.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik** | **Jumlah informasi yang disampaiakan ke publik** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengelolaan Website | Jumlah akun yang dikelola |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 bl | 2.400.000 | 12 bl | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  | Survey Kepuasan mayarakat | Jumlah responden yang disurvey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 dok | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan** | **Presentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi****Prosentase desa/kelurahan yang lunas bayar PBB** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah desa yang akuntabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pembinaaan Perangkat Desa | Jumlah perangkat desa yang mengikuti bimbingan  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi pengelolaan Aset Desa | Jumlah desa yang pengelolaan asset desa yang baik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 bln | 5.600.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembinaan Administrasi BPD | Jumlah desa dengan BPD yang aktif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  | Administrasi Desa | Jumlah desa yang tertib administrasi desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusnan Profil Desa | Jumlah desa yang aktif update profil desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **Prosentase pelaksanaan pembangunansecara swakelola****Presentase pendapatan APBDesa tepat waktu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan APBDesa | Jumlah desa yang dibina |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 bl | 140.400.000 | 12 bl | 150.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat** | **Presentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FKPA tingkat Kec.Sale | Jumlah FKAp yang aktif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi PKH Kecamatan | Jumlah keluarga yang menerima program |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 31.000.000 | 1 kgt | 20.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pembinaan PAUD | Jumlah PAUD yang dibina |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 52.300.00 | 1 kgt | 20.000.000 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi GAKY | Jumlah laporan fasilitas GAKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 5.000.000 | 1 kgt | 6.000.000 |  |  |
|  |  |  | **Pembinaan dan Kentraman dan Ketertiban Masyarakat**  | **Presentase penyelesaian permasalahan k-3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | Jumlah laporan hasilfasilitasi forum komunikasi pimpinan Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 bl | 34.800.000 | 12 bl | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  | Pembinaaan penyakit masyarakat | Jumlah kegiatan pekat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  | Sosialisasi penanggulangan Bencana | Jumlah desa siaga bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kgt | 3.800.000 | 1 kgt | 10.000.000 |  |  |

**TABEL. 6.2**

**TARGET RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SALE
TAHUN 2020 - 2021**

|  | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | Kondisi Kinerja Pada Akir Periode Renstra PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| target | Rp | target | Rp | target | Rp |
|  |  | Program Managemen Adminsitasi Pelayanan Umum, kepegawaian dan keuangan Perangkata Dearah |  | Prosentase Ketercapaian pelayanan Administrasi Umum |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Peningkatan manajemen Administrasi Pelayanan Umum  | % pemenuhan pelayanan Adminsytrasi perkantoran  | % | 95 | 225.160.000,- | 100 | 265.000.000,- | 100 |  |
|  |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | % Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik  | % | 100 | 511.000.000,- | 100 | 271.000.000,- | 100 |  |
|  |  |  | Peningkatan Kwalitas Sumber daya Aparatur  | % Pengelolaan managemen Kepegawaian yangdilaksanakan TepatWaktu  | % | 100 | 10.000.000,- | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  | Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Keuangan  | % Pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu | % | 100 | 138.700.000,- | 100 | 185.000.000,- | 100 |  |
|  |  | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah  |  | % Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja sakib  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyususnan Dokumen Perencanaan perangkat daerah  | Jumlah Indikator Kinerja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan  | % | 100 | 10.000.000,- | 100 | 20.000.000,- | 100 |  |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah  | Jumlah Capaian Indikator Kinerja  | % | 100 | 7.890.000,- | 100 | 35.000.000,- | 100 |  |
|  |  | Program peningkatan Keterbukaan Informasi Publik  |  | % Informasi yang di Sampaikan ke Publik  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengelolaan Informasi Keterbukaan Publik | Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik | % | 100 | 2.400.000,- | 100 | 15.000.000,- | 100 |  |
|  |  | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Keterntraman Masyarakat  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan rakyat  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa / keluarahan  | % Pemerintahan desa yang tertib administrasi  | % | 100 | 6.619.248.000,- | 100 | 8.074.398.000,- | 100 |  |
|  |  |  | Fasilitasi pemebedayaan masyarakat Desa  | % Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola  | % | 100 | 205.000.000,- | 100 | 255.000.000,- | 100 |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kesjahteraan Masyarakat  | % Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif | % | 100 | 290.000.000,- | 100 | 360.000.000,- | 100 |  |
|  |  |  | Pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat  | % Penyelesaian permasalahan K.3 | % | 100 | 80.000.000,- | 100 | 120.000.000,- | 100 |  |

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sale bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-20121 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sale dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan-kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang OPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di OPD.

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periodeRPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Persentase Layanan PATEN yang terfasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Presentasi Desa yang mempunyai dokumen RPJMDES, RKPDES dan APBDES | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Presentase PKK aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Presentase Sarpras dan pelayanan umum di Desa/kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**BAB VIII
P E N U T U P**

Rencana Strategis Kecamatan Sale Tahun 2016-2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus di implementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sale

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan kecamatan Sale . Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Sale telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas di dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sale ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Sale yang yang mengacu pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Rembang.

   Sale, Maret 2020.

 CAMAT SALE

Drs. SUBHAN

 Pembina Tk I

 NIP. 19661124 199203 1005